

PENERAPAN SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)

Saifuddin¹, Andrian Kaspari²

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Saifuddin.unuja@gmail.com¹

andriankaspari107@gmail.com²

ABSTRACK

The pawning system practiced by the people of Des. Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo is a customary system, which has lasted a long time and is still in effect today. This system arose because of the urgent need of those who mortgaged their fields, both because of the consumptive and productive needs. This research uses the qualitative method of applied research because it includes the researcher's effort to apply something new to the object of research. The results of the study found that the rice field pawn practiced by the community generally indicates the existence of a ribawi system and a form of denial, and is far from ta'awun. The Pawn Paddy solution in Islamic law is as follows: First, the Qardh al-hasan contract provides a loan with the condition that the fields are used as debt collateral to avoid fraud and fraud and there is no excess when returning the debt. Second, the al-mudharabah contract is intended for rice field owners to give profit sharing to murtahin until the capital used is paid off. And third, the al-bai al-murabahah murtahin contract will buy goods according to the wishes of Rahin and Rahin will provide benefits to the murtahin according to the agreement when it will last until the specified time limit.

Keywords: Pawn of Rice Fields, Islamic Law, Contract

ABSTRAK

Sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Des. Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo merupakan sistem adat, yang sudah berlangsung lama dan masih berlaku sampai sekarang. Sistem ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang menggadaikan sawahnya, baik karena faktor kebutuhan konsumtif, maupun produktif. Penelitian ini memakai metode kualitatif applied research (penelitian terapan) karena di dalamnya ada usaha peneliti untuk menerapkan sesuatu yang baru pada obyek penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat tersebut secara umum mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur ta'awun. Adapun solusi Gadai Sawah dalam syariat Islam adalah sebagai berikut: Pertama, akad Qardh al-hasan ini memberikan pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan dan tidak ada kelebihan ketika mengembalikan hutangnya. Kedua, akad al-mudharabah diperuntukkan bagi pemilik sawah akan memberikan bagi hasil kepada murtahin sampai modal yang digunakannya lunas. Dan ketiga, akad al-bai al-murabahah murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin dan rahin akan memberikan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

Kata kunci: Gadai Sawah, Syariat Islam, Akad

A. PENDAHULUAN

Salah satu praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Kab. Situbondo Kec. Mlandingan Des. Trebungan secara umum dan secara khusus kaum Muslimin dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai tanah atau sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi mereka ketika membutuhkan dana tunai secara mendesak.

Gadai tanah atau sawah merupakan praktek muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, dan belum ditemukan sebuah hasil penelitian tentang sejarah awal munculnya praktek gadai tersebut, karena praktek gadai dilakukan secara non formal atau hanya berlandaskan pada kesepakatan antar lisan dan kebiasaan. Bahkan praktek gadai itu dilakukan oleh umat Islam tanpa memperhatikan prinsip - prinsip dasar dalam bermuamalah berdasarkan syaria Islamiyah.¹

Utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan dalam praktek utang piutang pihak peminjam membutuhkan jaminan atas pinjaman yang diberikan agar peminjam bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (muamalah) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama makhluk.

Aturan Islam bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindari diri dari segala bentuk kezhaliman dan kerugian sehingga semua pihak akan merasakan keridhaan atas muamalah yang dilakukan. Islam menawarkan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat serta mewujudkan perdamaian antar sesama.

Islam mengatur peran laba dan membolehkan masing-masing individu untuk memperolehnya, dengan ketentuan harus tetap berada dalam ikatan-

¹ Tri Nadhirotur Roifah, "Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 1–31.

ikatan moral dan batasan-batasan kemaslahatan umum sesuai *Maqashid al-Syariah*. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu fenomena umum yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat petani di Kab. Situbondo Kec. Mlandingan Des. Trebungan adalah praktek gadai sawah yang aturan-aturannya berdasar pada hukum adat (kebiasaan) yang berlaku, dengan memperhitungkan aspek-aspek lain seperti aspek perundang-undangan tetapi mengabaikan aspek akad dalam ekonomi syariah.

Praktek gadai sawah ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan umum sebagai salah satu alternatif yang dianggap mudah oleh masyarakat agraris (petani) dalam mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dari fenomena ini peneliti memandang perlu dan merasa tertantang untuk mengkaji lebih jauh sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Kab. Situbondo Kec. Mlandingan Des. Trebungan dan bagaimana relevansinya dengan hukum ekonomi syariah, untuk itu penelitian ini akan memaparkan beberapa permasalahan yaitu bagaimana sistem Gadai Sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Kab. Situbondo Kec. Mlandingan Des. Trebungan, dan bagaimana Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif applied research* (penelitian terapan). Disebut penelitian terapan karena di dalamnya ada usaha peneliti untuk menerapkan sesuatu yang baru pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan praktis tertentu yaitu untuk mengambil langkah tertentu sebagai kebijakan ataupun model yang dianggap efektif dalam menerapkan hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai sawah.² Dan untuk sampai pada ketentuan di atas, peneliti mencoba menggabungkan sistem eksplorasi, deskripsi dan eksplanasi, yaitu usaha menjabarkan fenomena yang ada dalam masyarakat yang terkait dalam penelitian kemudian berusaha menggambarkan dan memaparkan karakter masyarakat yang diteliti dan seterusnya menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi dalam masyarakat. Selain itu, literatur pustaka juga termasuk bagian penelitian kualitatif karena data yang diperoleh di dalamnya tidak bisa dikuantifikasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan hukum normatif (*syar'i*) dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis serta kajian-kajian fikih terhadap masalah yang berhubungan dengan konsep gadai dalam aturan-aturan syariah. Kemudian Pendekatan sosiologi, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah keadaan masyarakat dengan penerapan pola gadai sawah yang dipraktekkan.

Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer adalah berupa data yang diperoleh dari informan dengan teknik wawancara mendalam terhadap individu yang secara langsung terlibat dalam kasus yang diteliti (penggadai sawah, pemegang gadai dan pemerintah setempat). Sedangkan data sekunder berupa data yang dijadikan landasan teori dalam membahas permasalahan yang bersumber dari studi pustaka melalui proses analisa, yang kemudian menjadi acuan dalam memahami masalah.

Dalam mencari data yang akurat peneliti mempergunakan metode interaktif yang terdiri dari wawancara yang dilakukan terhadap individu yang

² M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015).

terkait dalam penelitian. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara terbuka yang terdiri dari pernyataan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga narasumber bisa leluasa dalam memberi jawaban-jawabannya.

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara berencana dan wawancara tanpa terencana. Adapun wawancara tanpa terencana peneliti tetap memakai wawancara berfokus (*focused interview*), yaitu terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tapi tetap terpusat pada pokok masalah.

Kajian Pustaka

- **Konsep Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat (Islam), berdasar pada nilai-nilai mutlak yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan ciri utamanya adalah tidak menggunakan sistem riba yang merupakan perbedaan mendasar antara sistem perekonomian lainnya. Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut Ekonomi Islam.³

- a. **Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Di antara prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang tergambar dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- Kerjasama dan tolong menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi syariah

➤ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (Q.S.al-Maidah [5]:2).

³ Nina Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah," *skripsi uin walisongo semarang* 6 (2017): 5–9.

Tolong menolong dan kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini merupakan motivasi dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, ekonomi kuat dan ekonomi lemah, jika kedua dimensi sosial ini saling beriringan maka tidak mustahil perekonomian dapat menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Maka tidak dipungkiri jika sikap tolong menolong ini dijadikan acuan utama dalam gadai sawah sehingga seseorang menahan gadai tidak hanya memikirkan keuntungan semata.

➤ Larangan memakan harta yang bathil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisaa (4) : 29

Harta bathil adalah harta yang diperoleh dengan cara melanggar aturan syariat seperti mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, melakukan praktek riba dan lain-lain.

➤ Larangan melakukan praktek riba

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.⁴ Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴ Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realita Dan Kontekstual," *TransMedia Publising* (2015): 39.

ط ذ لِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ وَاحِدٍ لِّلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا بَيَّأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
ط هُمْ فِيهَا ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ رَبِّهِ فَاتَّهَى قَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
خُلِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba *Qardh* (utang) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.⁵ Contohnya: seseorang meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan

⁵ Imamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 3.

yang lebih baik atau memberinya suatu nilai manfaat seperti menempati rumahnya selama sebulan,⁶ Dalam praktek gadai, jika akad gadai adalah utang piutang maka pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman selama masa pinjaman sebagaimana yang berlaku dalam praktek gadai sawah adalah termasuk jenis riba *Qardh*.

- Gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah

Gadai atau *rahn* secara etimologi / bahasa adalah “tertahan” sebagai mana dalam satu ayat al-Qur’an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38)

Atau bermakna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh “Haram bagai seseorang kencing di air yang *rahin*, yaitu air yang tidak bergerak”. Sedangkan gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.⁷

- a. Dasar Hukum Gadai Dalam Islam

Dasar hukum gadai dalam Islam adalah bentuk legalitas diperbolehkannya melakukan transaksi gadai melalui beberapa petunjuk yang tertuang dalam Alqur’an dan Al-Hadist, diantaranya:

- ✓ Q.S. Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

⁶ Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.

⁷ Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah,” *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 181–198.

ط وَاللَّهُ ط وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ أَوْ تُمِنُوا أَمَانَتَهُ وَلَيَقْبِ اللَّهُ رَبَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِم

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bagi orang yang membuat akad dengan orang lain dan tidak menemukan juru tulis, maka untuk menjaga kepercayaan orang yang memberi piutang hendaknya pihak pengutang memberinya harta jaminan atas hutang yang diperolehnya, dengan ketentuan yang memberi piutang tetap menjaga harta dalam kekuasaannya itu.

✓ Hadits

Yang artinya: *Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menggadaikan padanya sebuah baju besi. Dari Aisyah r.a Berkata: “Rasulullah membeli bahan makanan dari yahudi secara bertanggung dan menyerahkan kepadanya baju besi sebagai gadainya”*.⁸

Menurut beberapa keterangan dari *muhadtstsin* bahwa yahudi yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Abi al-syehm yang berasal dari bani Dhafr (Aus), Rasulullah menggadaikan baju besinya pada Abi Syehm untuk mendapatkan tiga sha' gandum, hingga akhirnya Rasulullah saw. Wafat dan baju besi tersebut masih dalam jaminan gadai. Namun riwayat lain mengatakan bahwa baju besi tersebut ditebus oleh Abu Bakar.

⁸ Safrizal Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 231.

Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan hubungan kerja sama bagi siapa pun dibolehkan dalam islam, disamping itu Rasulullah saw. Menunjukkan kebolehan melakukan gadai kapanpun waktunya (bukan hanya dalam perjalanan) karena hadits diatas sudah *menta'qid* ayat: Q.S. Al-Baqarah (2):283

Hikmah dari bentuk muamalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah tersebut merupakan pembuka jalan kemudahan bagi seseorang yang berada dalam kesempitan dan kesulitan takkala menghadapi kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhanya. Maka salah satu solusi yang dibolehkan dalam islam untuk ditempuh adalah dengan melakukan gadai yaitu menyerahkan harta yang memiliki nilai ekonomis – menurut pandangan islam sebagai jaminan utang kepada orang yang memberi piutang, yang merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak atas utang piutang yang terjalin diantara keduanya.

b. Rukun dan Unsur - Unsur Gadai

Pada prinsipnya gadai memiliki empat unsur pokok, yaitu pemilik barang yang menggadaikan hartanya karena memperoleh utang dari seseorang disebut *al-rahin*, dan orang yang menguasai barang jaminan disebabkan ia memberi piutang disebut *al-murtahin*, sementara barang yang digadaikan disebut *al-marhun*. Dan utang yang menyebabkan adanya jaminan disebut *al-marhum bin*. Dengan demikian ruang lingkup gadai tidak bisa dipisahkan dari subjek dan objek, sebagai subjek adalah *al-rahin* dan *al-murtahin* sedangkan objeknya adalah *al marhun* dan *al-marhun bin*.

Menurut Hanafiyah rukun *gadai* adalah *ijab* dan *kabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad. Akan tetapi akad ini tidak terwujud secara sempurna tanpa disertai jaminan baik itu berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Contoh terjadinya *ijab kabul* adalah jika pemilik gadai mengatakan, “saya menggadaikan barang kepadamu sebagai jaminan utangku padamu, atau barang ini kugadaikan padamu atas piutang yang engkau berikan kepadaku”. Dan penahan gadai menjawab, “saya menerima” atau dengan kalimat yang lain “saya ridha”. Dalam akad ini tidak disyaratkan adanya lafaz gadai didalamnya seperti yang terjadi dalam jual beli, dengan demikian jika seseorang membeli sesuatu dengan beberapa dirham kemudian ia menyerahkan sesuatu (barang) ini kepada penjual, dan mengatakan kepada penjual tersebut peganglah (terimahlah barang) ini hingga aku memberimu harga (uang), dalam keadaan seperti ini transaksi gadai dapat terwujud, karena yang dijadikan dasar ibrah dalam akad adalah maknanya.

Rukun ini menurut jumhur ulama memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan rukun menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah rukun adalah bagian dari sesuatu yang berdiri sendiri. Sementara menurut Jumhur rukun adalah sesuatu yang (ada) dengan adanya yang lain, dan ia tidak dapat dikatakan rukun tanpa adanya yang lain. Baik itu bagian dari padanya ataupun tidak termasuk bagian dari padanya, seperti keberadaan aqid yang merupakan rukun, karena tidak dapat digambarkan keadaan akad tanpa adanya aqid, walaupun aqid bukanlah merupakan bagian dari akad (tidak termasuk akad). Sementara aqid menurut Hanafiyah adalah syarat akad.

Dari penjelasan di atas, maka dipahami bahwa yang termasuk rukun gadai itu adalah:

- a) *al-Rahin* (yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (yang menerima/memegang gadai)
- c) *Al-marhun* (barang yang digadaikan)
- d) *Al-marhun bih* (utang yang diserahkan oleh murtahin kepada rahin)
- e) *Shigat ijab dan qabul* (kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai)⁹

⁹ Fadlan, “Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep),” *Ekonomi dan Bisnis Islam Stain Pamekasan* 13 (2016): 134.

c. Bentuk dan Jenis Akad Perjanjian Gadai

Gadai memiliki tiga bentuk yang disepakati: *Pertama*, gadai terwujud ketika terjadi akad utang piutang. Sebagaimana jika penjual mensyaratkan pada pembeli untuk menyerahkan gadai sesuai nilai pinjaman untuk sebuah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu tertentu. Hal ini dianggap sah oleh mazhab ulama, karena terciptanya hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan yang terkait dengan gadai menggadai.

Kedua, Gadai terhitung setelah terjadinya pemberian pinjaman. Hal ini dianggap sah, karena adanya ketentuan utang sehingga menyebabkan pengambilan pegangan (penyanderaan barang gadai) diperbolehkan sebagai jaminan utang, sedangkan yang disyaratkan pada ayat *farihanun makbudhah*, karena posisi *gadai* pada dasarnya merupakan pengganti dan pencatatan, dan pencatatan itu terjadi setelah transaksi.

Ketiga, gadai terhitung sebelum pemberian pinjaman. Seperti jika seseorang mengatakan saya menggadaikan kebunku kepadamu seratus dirham dalam bentuk kredit. Bentuk seperti ini dianggap sah oleh malikiyah dan hanafiyah. Karena *gadai* merupakan jaminan utang, maka terjadinya akad sebelum penyerahan pinjaman dibolehkan. Namun sistem seperti ini dianggap tidak sah oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, dengan alasan bahwa penyerahan jaminan yang tidak diperbolehkan sebelum terjadinya pemberian peminjaman, karena *gadai* mengikuti pada utang bukan justru mendahuluinya.

Adapun alternatif jenis akad perjanjian yang dapat dilakukan dalam gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian yaitu:

a) Akad *al-Qardh al-hasan*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam

akad *tathawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

Transaksi *al-qardh* ini diperbolehkan oleh ulama berdasarkan hadits yang artinya “*tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”. Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama itu bisa didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan umatnya.

Akad *al-qardh al-hasan* ini bisa digunakan dalam transaksi gadai bagi yang ingin menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan sangat mendesak (*dharuriyah*). Adapun jika barang gadai yang memerlukan biaya penjagaan atau perawatan. Maka *murtahin* boleh menerima biaya upah atau *fee* dari *rahin* sebagai kompensasi dari penjagaan dan perawatan barang gadai tersebut.

b) Akad *al-Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan:

¹⁰ Nanda Suryadi and Yusmila Rani Putri, “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 37–50.

¹¹ Meuthiyah Athifa Arifin Mahmudatus Sa’diyah, “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah,” *Equilibrium* 1 (2013): 302–323.

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.”

Al-mudharabah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

c) *Al-Bai al-Murabahah*

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹²

Akad *al-bai al-murabah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

d. Syarat-syarat gadai

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), syarat-syarat *mahrhun* (barang gadai), syarat-syarat *mahrhun bih* (utang) serta syarat-syarat *shigat*.

1) Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*:

a) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap

¹² Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin Abdullah, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat,” *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60.

individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaianya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.¹³

b) Mumayyiz atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *mumayyiz*. Yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad tabarru' karena hal ini sangat erat kaitannya.

2) Syarat-syarat barang Gadai¹⁴

a) Harta yang memiliki nilai ekonomis: gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa dimanfaatkan menurut syara' seperti babi dan khamar.

b) Ada barang ketika berlangsung akad, gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.

c) Milik pribadi penggadai

d) Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.

e) Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.

f) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

¹³ Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)," *Wahana Akademika* 15, no. 1 (2013): 27.

¹⁴ Zia Ulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)," *Skripsi UNMUH Surakarta* 3, no. 2 (2014): 1-46,
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

3) Syarat-syarat *Marhun bih*¹⁵

- a) Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan utang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
- b) Ditentukan jumlahnya.
- c) Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.
- d) Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya
- e) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

4) Syarat-syarat *Shigat*¹⁶

Tidak terikat dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak. Berkesinambungannya Ijab dan kabul dan berada dalam satu majelis.

¹⁵ Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia."

¹⁶ Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): 87–97.

C. PEMBAHASAN

Pada masa pandemi covid 19 sangat berdampak pada kondisi ekonomi sehingga mayoritas masyarakat yang membutuhkan dana akan menggadaikan sawah mereka ataupun melakukan perpanjangan masa gadai. Hal ini di manfaatkan oleh sebagian masyarakat yang perekonomiannya menengah keatas untuk melakukan transaksi gadai sawah karena sangat menguntungkan bagi mereka di karenakan Tradisi di Kab. Situbondo Kec. Mlandingan Des. Trebungan penerima gadai berhak mengelola atas tanah yang di gadaikan, bahkan penerima gadai berhak mengambil buah dan rumput dari pada tanaman yang sudah di tanam di tanah yang digadaikan sebelumnya seperti buah pohon kelapa dan rumput gajah.¹⁷

1. Gadai Sawah Yang dipraktikkan Masyarakat

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai.¹⁸ Gadai sawah dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai), kepada pihak kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus), sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara.¹⁹

Dengan demikian gadai tanah (sawah) adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, pihak pertama adalah pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya kepada pihak kedua sebagai pemegang gadai yang memberi pinjaman kepada pihak pertama, dengan ketentuan sawah menjadi milik sementara pemegang gadai dan bebas mengambil manfaat atau hasil dari sawah yang ditahannya selama pinjaman belum dikembalikan oleh pemilik sawah. Adapun jika pemilik sawah mengembalikan uang gadai (pinjaman) maka secara otomatis ia telah menebus sawah yang digadaikannya dan berhak mengambil kembali sawah tersebut.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan P. Asnawi (Mentri perairan / lobhenyu), kediaman Dusun Trebungan Barat, pada jam 07.30 tanggal 3 Oktober 2020

¹⁸ Faridy, "Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)," *HAKAM* 2, no. 56 (2018): 60–74.

¹⁹ Jawade Hafidz Yunianto Wahyu Sadewa, "Peran PPAT Dalam Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang," *JURNAL AKTA* 4, no. 2 (2017): 158–161.

2. Penyebab Terjadinya Praktek Gadai Sawah Dalam Masyarakat.

Munculnya praktek gadai sawah dalam masyarakat dilatar belakangi oleh kebutuhan akan uang tunai (cash money) yang dianggap mendesak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

3. Penyebab Pemilik Sawah Menggadaikan Sawahnya

Masyarakat menggadaikan sawahnya pada dasarnya disebabkan kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan akan biaya berobat ke rumah sakit yang di luar tanggungan BPJS, biaya sekolah dan kuliah anak dan bahkan tambahan untuk ongkos naik haji. Kebutuhan produktif seperti kebutuhan untuk mendapatkan modal usaha. Diantara keterangan dari narasumber yang menggadaikan sawahnya menuturkan bahwa ia melakukan praktek gadai sawah karena keperluan biaya kuliah anaknya, kendati sawah yang digadaikan tersebut merupakan sumber mata pencaharian keluarga mereka. Disamping itu terdapat pula diantara masyarakat yang menggadaikan sawahnya karena keperluan menambah modal kerja (modal usaha), pembelian barang untuk usaha produktif seperti pembelian mesin pembuat kerupuk maupun pembelian barang konsumtif seperti material bangunan rumah tinggal yang sebagian materialnya sudah di dapatkan dari pemerintah tetapi tidak mencukupi untuk membangun rumah yang layak sehingga masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk menambah material tersebut terpaksa menggadaikan sawahnya dan lain-lain.

Namun dari sekian fenomena yang peneliti temukan, masyarakat pada umumnya menggadaikan sawahnya di sebabkan kebutuhan yang mendesak dalam skala konsumtif baik konsumtif primer maupun konsumtif sekunder yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat menggadaikan sawahnya dan sudah berlangsung lama namun belum memiliki kemampuan untuk menebusnya kembali. Berikut ini dapat diilustrasikan penyebab penggadai menggadaikan sawahnya sebagaimana data yang diperoleh dilapangan²⁰:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti biaya kuliah.
- b) Untuk memperoleh dana tunai dengan cepat.

²⁰ Hasil Wawancara dengan H. Syaiful (Penggadai), kediaman Dusun Trebungan Barat pada jam 19.30 tanggal 04 Oktober 2020

- c) Tidak terkejutnya waktu untuk membayar pokok maupun bunganya, seperti yang berlaku di beberapa lembaga keuangan, tetap masih bisa diatur secara kekeluargaan.
- d) Sawah yang digadaikan sewaktu-waktu dapat diambil kembali jika pemilik sawah memiliki uang untuk menebusnya.
- e) Peggadai memilih menggadaikan sawahnya dari pada menjualnya, karena sawah adalah salah satu mayoritas mata pencaharian mereka di desa dan nilai sawah setiap tahunnya terus meningkat.

4. Penyebab Pemegang Gadai untuk Menerima Tawaran Gadai Sawah

Dalam transaksi gadai sawah ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan dan menerima gadai sawah yaitu:

- a) Sebagai sarana untuk investasi dengan cara praktis dikarenakan kebanyakan masyarakat memperkerjakan sawah tersebut.
- b) Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding menabung uang di bank.
- c) Menambah penghasilan
- d) Menolong kerabat yang membutuhkan dana segar²¹.

Namun secara keseluruhan narasumber sepakat jika mendapat keuntungan merupakan faktor utama yang memotivasi seseorang menerima gadai. Hal ini terbukti bahwa dari sekian narasumber yang diwawancarai hanya satu yang mengaku rela menggadai sawah (khusus untuk sawah saudaranya) dengan tidak mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan padanya. Walaupun ada beberapa narasumber yang mengaku terdorong menggadai sawah karena sekedar menolong kerabat dekatnya namun tetap tidak rela (merasa rugi) jika tidak memperoleh hasil dari sawah yang ditahannya.

5. Bentuk Perjanjian Gadai Sawah.

Perjanjian gadai sawah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak peggadai dan pihak pemegang gadai, namun perjanjian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya perjanjian gadai sawah ini sangatlah fleksibel. Ada beberapa bentuk perjanjian gadai sawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian tertulis yang disaksikan oleh beberapa orang saksi selain saksi dari keluarga peggadai dan pemegang gadai, sebagai respon atisipatif dan

²¹ Hasil Wawancara dengan Irama / B. Rian (Pemegang Gadai), kediaman Dusun Trebungan Barat pada jam 13.00 tanggal 05 Oktober 2020

langkah preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan bisa terjadi di kedua belah pihak kemudian hari antara pihak penggadai dan pemegang gadai.

- b. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi orang luar (keluarga penggadai dan pemegang gadai), hal ini diyakini oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut dianggap akurat, dan tidak mengkhawatirkan akan kemungkinan timbulnya perselisihan diantara ke dua belah pihak.
- c. Perjanjian tidak tertulis, cara ini dipraktekkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau karena sudah terciptanya rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Saling percaya yang tinggi lebih diutamakan oleh kedua belah pihak dibanding membuat perjanjian yang disaksikan oleh orang luar atau masyarakat setempat.

Point pertama inilah yang paling banyak dipraktekkan masyarakat, karena dianggap sebagai cara yang mudah dan lebih praktis tidak seperti di lembaga keuangan, sehingga perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak dianggap sudah memadai dan mewakili maksud masing-masing yang bertransaksi, penggadai dan pemegang gadai, lain halnya dengan ketika kerabat atau saudara sendiri mau menggadaikan sawahnya yang kebanyakan dari mereka memakai perjanjian tidak tertulis.

Menyikapi tata cara masyarakat dalam menggadaikan sawah, poin ketiga lebih banyak mengundang resiko yang tidak diharapkan meskipun yang melakukan transaksi tersebut kebanyakan saudara atau kerabat sendiri. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkannya tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya perjanjian yang pernah terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua. Demikian pula poin kedua, karena menurut aturan hukum adat yang berlaku, perjanjian gadai-menggadai dan semacamnya, mesti disaksikan oleh orang luar selain dari keluarga sendiri.

Berkaitan dengan berbagai cara yang dipraktekkan tersebut, pada dasarnya menurut hukum adat, perjanjian gadai tanah merupakan perbuatan hukum (*vechtshandeling*), dengan demikian perjanjiannya harus bersifat terang dan jelas, untuk itu mesti diketahui dan dilakukan di depan beberapa orang saksi yang kemudian nama-nama saksi yang bersangkutan di cantumkan juga di dalam surat perjanjian tersebut.

Perjanjian atau akad yang diadakan oleh pihak penahan sawah/ pemegang gadai dan pihak pemilik sawah/ penggadai, pada umumnya hanya sebatas bukti yang melegetimasi adanya gadai-menggadai antara kedua belah pihak. Sementara inti dari perjanjian tersebut tidaklah mengikat dan sangat fleksibel, karena gadai tanah menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, yang perjanjiannya dilakukan dan umumnya tidak menetapkan tenggang waktu tertentu mengenai berakhirnya perjanjian gadai, sehingga implikasi dari perjanjian ini dapat menimbulkan:

- a. Sawah yang digadaikan dapat ditebus setiap saat setelah pemilik sawah mempunyai uang untuk menebusnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum adat menyangkut larangan penebusan, seperti munculnya keinginan menebus sebelum hasil panen, sebelum panen tersebut diperoleh oleh penahan sawah/ pemegang gadai.
- b. Tidak adanya batas waktu perjanjian yang disepakati yang menyebabkan terbukanya peluang yang memungkinkan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian gadai tanah diwariskan kepada ahli waris masing-masing pihak.
- c. Sejalan dengan dua diatas, maka sangatlah logis jika bentuk perjanjian gadai tanah tidak dikenal adanya batas waktu kadaluarsa untuk menebus sawah yang digadaikan²²

6. Mekanisme Gadai Sawah

Teknis perjanjian gadai sawah sebagai berikut:

- a. Penggadai menjaminkan sawah kepada pihak pemegang gadai untuk mendapatkan pinjaman
- b. Penggadai dan pemegang gadai menyepakati akad gadai, akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk melegitasi terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak.
- c. Pemegang gadai berhak menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang, dan berhak mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/ penggadai menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang yang telah dipinjamkan pemegang sawah/ pemilik piutang.

Dari pemaparan di atas, maka yang paling diutungkan dalam hal ini adalah pihak pemegang gadai/ pemilik piutang, karena sawah yang menjadi jaminan akan

²² Wawancara dengan Samsul Hadi, S.pd (Tokoh Masyarakat), kediaman Dusun Trebungan Barat, pada jam 20.00 tanggal 07 Oktober 2020

dikuasainya selama piutangnya belum dikembalikan oleh pemilik sawah/pengutang.

Pengutang atau pemilik sawah, tidak bisa menikmati hasil sawahnya sebagai pemilik penuh, selama ia masih berutang pada pemegang sawah tanpa batas waktu yang ditentukan, kecuali jika pemegang sawah mengizinkan untuk menggarapnya, itu pun sebagai pekerja pada sawah yang digadaikan tersebut, dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai perbandingan bagian yang telah disepakati, sesuai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dengan demikian pemegang sawah tetap mendapat piutangnya secara utuh disamping menikmati hasil sawah milik pengutang yang berada dalam penguasannya.

7. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Sawah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai sawah atau jual gadai adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang pemilik tanah, hingga uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai, dan selama dalam kekuasaan pihak pemegang gadai, ia berhak memanfaatkan (mengambil manfaat/hasil dari) sawah tersebut. Sedangkan pihak pemilik sawah (penggadai) tidak mendapatkan apa-apa (dari sawah tersebut) kecuali jika ia menjadi penggarap sawah tersebut (sebagai pihak lain).

Gadai menurut ketentuan hukum adat diatas mengandung unsur eksploitasi, kedhaliman dan riba. Untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam (syariah) tersebut, sistem ekonomi Islam mengatur tentang gadai termasuk pemanfaatan barang yang digadaikan dan akad perjanjian.

a. Pemanfaatan Barang yang digadaikan

Dalam literatur hukum ekonomi Islam, para ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan dilarang dimanfaatkan oleh pemegang gadai, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah riba, karena setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat di dalamnya adalah riba kecuali barang atau hewan yang membutuhkan perawatan kita boleh mengambil manfaat didalamnya. Barang gadai dalam Islam hanyalah merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai tersebut.

b. Akad Perjanjian

Pada dasarnya Islam tetap mengakui peran laba dalam praktek perekonomian, namun dengan harus sejalan dengan kriteria yang telah digariskan oleh ketentuan syariat. Ketentuan ini tidak terlepas dari sikap

tolong menolong, keadilan dan terbebas dari riba. Untuk mengaktualisasikan ketentuan syariat ini dalam praktek gadai sawah yang berlaku dalam masyarakat, maka ditawarkan tiga bentuk akad yang dapat dirumuskan sesuai kebutuhan dan kepentingan penggadai sekaligus untuk menghindari timbulnya kerugian salah satu pihak antara penggadai dan pemegang gadai dalam transaksi gadai sawah, maka alternatif yang dapat diambil dalam *Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam* mekanisme perjalanan gadai sawah, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian gadai. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah:

➤ *Al-Qardh al-Hasan*

Akad ini dilakukan untuk penggadai yang ingin menggadai sawahnya untuk keperluan konsumtif yang bersifat *daruriy*, seperti membayar uang sekolah, biaya pengobatan, dan membeli kebutuhan pokok atau primer (beras, lauk pauk, dan lain-lain). Dengan demikian, jika pemegang gadai mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penjagaan atas barang gadai, maka penggadai akan memberikan upah atau *fee* kepada pemegang gadai karena telah menjaga atau merawat sawah. Jika tidak ada biaya pemeliharaan atau biaya penjagaan, maka pemegang gadai tidak dibolehkan mengambil apapun dari penggadai termasuk memanfaatkan sawah tersebut. Dengan demikian penggadai tetap berhak menggarap dan memperoleh hasil dari sawahnya sehingga mempercepat proses pelunasan utangnya. Berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan. Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman.

➤ *Akad al-mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw menyatakan:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.”

Al-mudharabah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

➤ *Al-Bai al-murabahah*

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²⁴

Akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

²³ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah."

²⁴ Makkulau and Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat."

D. PENUTUP

Sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Des. Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo merupakan sistem adat, yang sudah berlangsung lama dan masih berlaku sampai sekarang. Sistem ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang menggadaikan sawahnya, baik karena faktor kebutuhan konsumtif, maupun produktif.

Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemberi hutang berhak menahan sawah pengutang dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan hutang yang harus dibayarkan oleh pemilik sawah tidak berkurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh pemilik piutang dalam kurun beberapa waktu. Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Des. Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo secara umum, mengindikasikan adanya sistem *ribawi* dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun*.

Adapun Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam dalam praktek gadai sawah ini, sebagai alternatif solutif dalam menghindari praktik *ribawi* dan bentuk pendhaliman adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk akad sebagai berikut: Pertama, akad *Qardh al-hasan*, berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan. Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman. Kedua, akad *al-mudharabah*, diperuntukkan bagi pemilik sawah yang membutuhkan modal usaha, dalam hal ini *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang digunakanya dilunasi. Dan ketiga, akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan. Ketiga akad di atas tidak mensyaratkan pengambilan manfaat atau hasil oleh pemegang gadai dari sawah yang digadaikan, sehingga pemilik sawah tetap berhak memanfaatkan sawah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Arif. "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)." *Wahana Akademika* 15, no. 1 (2013): 27.
- Fadlan. "Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)." *Ekonomi dan Bisnis Islam Stain Pamekasan* 13 (2016): 134.
- Faridy. "Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)." *HAKAM* 2, no. 56 (2018): 60–74.
- Hukmiah. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah." *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 181–198.
- Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiyah Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Equilibrium* 1 (2013): 302–323.
- Makkulau, Andi Rio, and M Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60.
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.
- Masse, Rahman Ambo. "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realita Dan Kontekstual." *TransMedia Publising* (2015): 39.
- Muchsin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): 87–97.
- Muttaqin, Imamil. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 3.
- Nina Amanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah." *skripsi uin walisongo semarang* 6 (2017): 5–9.
- Safrizal, Safrizal. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 231.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suryadi, Nanda, and Yusmila Rani Putri. "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan

Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 37–50.

Tri Nadhirotur Roifah. “Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 1–31.

Ulhaq, Zia. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat).” *Skripsi UNMUH Surakarta* 3, no. 2 (2014): 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

Yunianto Wahyu Sadewa, Jawade Hafidz. “Peran PPAT Dalam Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang.” *JURNAL AKTA* 4, no. 2 (2017): 158–161.